



**Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian**



INDEKS KETAHANAN PANGAN 2020



KATA PENGANTAR

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan. Nilai IKP 2020 ini merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2020.

IKP 2020 tingkat kabupaten/kota/provinsi yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan merupakan pemutakhiran IKP 2019 yang telah disusun sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan terlihat dari peningkatan nilai IKP. Oleh karena itu, IKP menjadi penting pada saat perencanaan program kegiatan pengentasan daerah rentan rawan pangan untuk menetapkan wilayah prioritas dan intervensi program spesifik yang akan dilaksanakan.

Semoga akselerasi program ketahanan pangan lebih cepat, fokus, dan tepat sasaran sehingga target pemerintah untuk pemerataan pertumbuhan pembangunan melalui penurunan stunting, kemiskinan dan kerentanan pangan dapat segera terwujud.

Kepala Badan Ketahanan Pangan



Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PENDAHULUAN	1
KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN	1
HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN	7
KESIMPULAN.....	18
REFERENSI	19
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement.....	5
Tabel 2. Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement	5
Tabel 3. Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan	7
Tabel 4. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 2020.....	8
Tabel 5. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2020	13
Tabel 6. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2020	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	2
Gambar 2. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2020	15
Gambar 3. Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2020	16
Gambar 4. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2020	17
Gambar 5. Distribusi IKP Provinsi Tahun 2020	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2020	21
Lampiran 2. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun 2020.....	37
Lampiran 3. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi Tahun 2020	42

INDEKS KETAHANAN PANGAN

PENDAHULUAN

Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2020 menyusun IKP Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota sebagai pemutakhiran IKP 2019 dan untuk melengkapi penyusunan IKP 2020 disusun juga unit analisis tingkat provinsi. Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (*Global Food Security Index - GFSI*) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (Gambar 1).

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.



Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. **Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih.** Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi
2. **Indeks Ketahanan Pangan**

jalar. Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar menggunakan angka tetap 2019 dari BPS dan Kementerian Pertanian.

2. **Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.** Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi *et al.* 2014; Riyadi *et al.* 2011; Ramli *et al.* 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn 2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2019, BPS.
3. **Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.** Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori *Engel* menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2019, BPS.
4. **Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.** Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi *et al.* 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2019, BPS.
5. **Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.** Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood *et al.* 1991). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2019, BPS.
6. **Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.** Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air

hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT *et al.* 2015; Kavosi *et al.* 2014; Khan dan Gill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomas dan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas 2019, BPS.

7. **Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.** Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2019, Kementerian Kesehatan.
8. **Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).** Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT *et al.* 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, Kementerian Kesehatan.
9. **Angka harapan hidup pada saat lahir.** Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2019, BPS.

Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI (EIU 2018 dan 2019) dan GHI (IFPRI 2018 dan 2019). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement* (Tabel 1). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Prevalensi balita stunting	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Besaran bobot yang digunakan untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kota (Tabel 2).

Tabel 2. Bobot Indikator Kota Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	-
Sub Total		-
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
Sub Total		0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,08
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18

No	Indikator	Bobot
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Prevalensi balita stunting	0,08
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
Sub Total		0,55

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

Dimana:

i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9

j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98

Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke- j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke- i

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke- i pada kabupaten/kota ke- j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 3). *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 3. Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
2	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN

Hasil perhitungan IKP 2020 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten, kota dan provinsi) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur.

Lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,96) dan Badung (89,29) di Provinsi Bali; Sukoharjo (88,76) dan Pati (88,25) di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Puncak (12,63), Dogiyai (14,70), Nduga (15,54), Membramo Tengah (19,07) dan Membramo Raya (19,80). Peringkat dan IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 2020

Peringkat	Nama Kabupaten	IKP	Peringkat	Nama Kabupaten	IKP
1	Tabanan	90,05	42	Kutai	84,28
2	Gianyar	89,96	43	Poso	84,22
3	Badung	89,29	44	Minahasa Selatan	84,17
4	Sukoharjo	88,76	45	Agam	84,10
5	Pati	88,25	46	Cilacap	84,04
6	Gresik	88,02	47	Klaten	84,03
7	Bantaeng	87,38	48	Aceh Besar	83,99
8	Karanganyar	87,22	49	Tapin	83,98
9	Sidenreng Rappang	87,17	50	Jepara	83,90
10	Kudus	86,91	51	Bekasi	83,86
11	Magetan	86,87	52	Blitar	83,81
12	Luwu Timur	86,70	53	Pringsewu	83,79
13	Semarang	86,69	54	Rembang	83,75
14	Minahasa	86,64	55	Bojonegoro	83,73
15	Barru	86,61	56	Grobogan	83,68
16	Wonogiri	86,55	57	Mesuji	83,66
17	Tanah Bumbu	86,50	58	Bulukumba	83,61
18	Sragen	86,21	59	Tuban	83,57
19	Penajam Paser Utara	86,20	60	Sinjai	83,56
20	Soppeng	86,16	61	Wajo	83,52
21	Minahasa Utara	86,06	62	Jombang	83,43
22	Mojokerto	85,92	63	Sidoarjo	83,42
23	Lamongan	85,62	64	Karo	83,37
24	Blora	85,47	65	Luwu	83,20
25	Banggai	85,38	66	Konawe/Kab Kendari	83,18
26	Boyolali	85,35	67	Maros	83,11
27	Klungkung	85,35	68	Lamandau	83,10
28	Berau	85,34	69	Barito Utara	83,10
29	Bolaang Mongondow	85,32	70	Serdang Bedagai	83,03
30	Kendal	85,24	71	Bombana	83,03
31	Gowa	85,05	72	Pinrang	83,01
32	Demak	85,04	73	Ngawi	83,00
33	Madiun	85,00	74	Mamuju Tengah	82,95
34	Kolaka Timur	84,90	75	Takalar	82,85
35	Tanah Datar	84,88	76	Purworejo	82,85
36	Ponorogo	84,70	77	Tulang Bawang	82,83
37	Pesisir Selatan	84,65	78	Bone	82,79
38	Tulungagung	84,56	79	Minahasa Tenggara	82,66
39	Karawang	84,51	80	Subang	82,66
40	Bolmong Timur	84,31	81	Jembrana	82,56
41	Deli Serdang	84,30	82	Morowali	82,44

Peringkat	Nama Kabupaten	IKP	Peringkat	Nama Kabupaten	IKP
83	Banyuwangi	82,40	126	Pacitan	80,23
84	Sumbawa Barat	82,33	127	Purbalingga	80,15
85	Sumbawa	82,31	128	Pesawaran	80,15
86	Sleman	82,30	129	Bone Bolango	80,12
87	Pasir	82,26	130	Banjar	80,09
88	Indramayu	82,17	131	Barito Kuala	80,08
89	Temanggung	82,16	132	Enrekang	80,06
90	Balangan	82,06	133	Pulang Pisau	80,03
91	Pangandaran	81,99	134	Kuningan	80,01
92	Nganjuk	81,98	135	Boalemo	79,99
93	Tanah Laut	81,85	136	Kota Baru	79,96
94	Konawe Selatan	81,82	137	Kolaka Utara	79,93
95	Malang	81,60	138	Mamuju Utara	79,89
96	Jeneponto	81,55	139	Bolmong Selatan	79,88
97	Sumedang	81,46	140	Lampung Tengah	79,83
98	Kerinci	81,46	141	Pasaman	79,73
99	Tegal	81,41	142	Bantul	79,73
100	Kolaka	81,35	143	Cirebon	79,68
101	Pohuwato	81,34	144	Toraja Utara	79,59
102	Batang	81,28	145	Solok	79,57
103	Magelang	81,27	146	Bima	79,54
104	OKU Timur	81,22	147	Hulu Sungai Tengah	79,50
105	Kepulauan Talaud	81,17	148	Lampung Timur	79,50
106	Bengkayang	81,17	149	Bireuen	79,43
107	Dompu	81,16	150	Aceh Jaya	79,42
108	Bolmong Utara	81,11	151	Gorontalo Utara	79,41
109	Majalengka	81,02	152	Bangka	79,30
110	Solok Selatan	81,00	153	Lampung Selatan	79,23
111	Padang Pariaman	80,99	154	Ciamis	79,21
112	Bangka Selatan	80,89	155	Pemalang	79,19
113	Toba Samosir	80,80	156	Kediri	79,19
114	Banyumas	80,48	157	Pangkajene Kepulauan	79,16
115	Luwu Utara	80,47	158	Bandung	79,08
116	Tabalong	80,44	159	Aceh Tamiang	78,99
117	Limapuluh Koto	80,42	160	Katingan	78,94
118	Kebumen	80,41	161	Pekalongan	78,86
119	Hulu Sungai Utara	80,40	162	Hulu Sungai Selatan	78,68
120	Trenggalek	80,39	163	Purwakarta	78,67
121	Simalungun	80,34	164	Toli-Toli	78,66
122	Gunung Kidul	80,32	165	Aceh Barat	78,61
123	Kulon Progo	80,31	166	Wonosobo	78,58
124	Gorontalo	80,26	167	Mamuju	78,56
125	Ngada	80,24	168	Banjarnegara	78,45

Peringkat	Nama Kabupaten	IKP	Peringkat	Nama Kabupaten	IKP
169	Halmahera Utara	78,44	212	Pulau Morotai	76,07
170	Langkat	78,40	213	Samosir	75,92
171	Pasaman Barat	78,35	214	Lombok Barat	75,92
172	Morowali Utara	78,31	215	Bandung Barat	75,76
173	Muna Barat	78,28	216	Brebes	75,73
174	Pasuruan	78,26	217	Jember	75,72
175	Karangasem	78,25	218	Manokwari	75,42
176	Sanggau	78,20	219	Parigi Moutong	75,05
177	Buleleng	78,16	220	Musi Banyuasin	75,03
178	Dharmas Raya	78,13	221	Nagan Raya	75,00
179	Banyuasin	77,90	222	Barito Timur	74,96
180	Situbondo	77,89	223	Wakatobi	74,93
181	Dairi	77,86	224	Tapanuli Selatan	74,81
182	Sawah Lunto/Sijunjung	77,85	225	Sigi	74,75
183	Tapanuli Utara	77,84	226	Gayo Lues	74,68
184	Kapuas	77,83	227	Tanggamus	74,67
185	Kotawaringin Timur	77,80	228	Nageko	74,64
186	Labuhan Batu	77,75	229	Piddie	74,57
187	Pidie Jaya	77,66	230	Bengkulu Selatan	74,54
188	Bulungan	77,63	231	Pamekasan	74,48
189	Merauke	77,60	232	Halmahera Timur	74,38
190	Tulang Bawang Barat	77,58	233	Sumenep	74,35
191	Lumajang	77,57	234	Ketapang	74,24
192	Buol	77,56	235	Ogan Komering Ulu	74,23
193	Musi Rawas	77,53	236	Bangkalan	74,21
194	Tojo Una-Una	77,52	237	Kayong Utara	74,12
195	Nunukan	77,45	238	Aceh Timur	74,10
196	Muna	77,43	239	Pontianak/ Mempawah	74,08
197	Humbang Hasundutan	77,29	240	Lampung Barat	74,02
198	Sukabumi	77,18	241	Konawe Utara	73,99
199	Siak	77,12	242	Aceh Tenggara	73,95
200	Lombok Tengah	77,10	243	Bangli	73,89
201	Serang	77,07	244	OKU Selatan	73,86
202	Buru	76,92	245	Ogan Ilir	73,83
203	Tana Toraja	76,88	246	Majene	73,71
204	Garut	76,62	247	Bondowoso	73,68
205	Aceh Barat Daya	76,60	248	Sukamara	73,52
206	Batu Bara	76,57	249	Lombok Timur	73,50
207	Sekadau	76,22	250	Buton Tengah	73,49
208	Aceh Utara	76,20	251	Buton	73,43
209	Cianjur	76,19	252	Way Kanan	73,34
210	Ogan Komering Ilir	76,12	253	Tasikmalaya	73,28
211	Lebong	76,09	254	Polewali Mamasa	73,27

Peringkat	Nama Kabupaten	IKP	Peringkat	Nama Kabupaten	IKP
255	Kutai Timur	73,13	298	Malaka	68,89
256	Asahan	73,11	299	Ende	68,70
257	Labuhan Batu Utara	73,09	300	Timor Tengah Utara	68,61
258	Pesisir Barat	72,93	301	Mandailing Natal	68,37
259	Sintang	72,89	302	Sarolangun	68,33
260	Sikka	72,81	303	Tebo	68,33
261	Merangin	72,79	304	Rote Nda	68,21
262	Muara Enim (Liot)	72,70	305	Bengkulu Utara	68,15
263	Pandeglang	72,59	306	Nias Utara	68,10
264	Bangka Barat	72,53	307	Padang Lawas Utara	67,99
265	Landak	72,50	308	Kuantan Sengingi	67,85
266	Tangerang	72,47	309	Barito Selatan	67,78
267	Simeulue	72,43	310	Seluma	67,72
268	Kubu Raya	72,36	311	Nabire	67,65
269	Sampang	72,08	312	Indragiri Hilir	67,48
270	Maluku Tengah	72,00	313	Konawe Kepulauan	67,45
271	Aceh Selatan	71,92	314	Bengkulu Tengah	67,24
272	Manggarai	71,70	315	Tanjung Jabung Barat	66,92
273	Pakpak Barat	71,65	316	Sumba Timur	66,68
274	Lampung Utara	71,51	317	Bogor	66,64
275	Mukomuko	71,46	318	Rokan Hilir	66,63
276	Aceh Tengah	71,07	319	Indragiri Hulu	66,58
277	Belu	71,06	320	Maluku Barat Daya	66,55
278	Manggarai Barat	71,05	321	Lombok Utara	66,37
279	Lebak	70,78	322	Lembata	66,18
280	Malinau	70,78	323	Kupang	66,11
281	Kapuas Hulu	70,70	324	Bengkalis	65,95
282	Kaur	70,68	325	Sorong	65,87
283	Buton Utara	70,66	326	Manokwari Selatan	65,78
284	Rejang Lebong	70,64	327	Empat Lawang	65,75
285	Lahat	70,55	328	Nias Selatan	65,62
286	Buton Selatan	70,19	329	Manggarai Timur	65,58
287	Penukal Abab Lematang Ilir	70,18	330	Batanghari	65,53
288	Tapanuli Tengah	70,13	331	Seruyan	65,52
289	Sambas	70,04	332	Halmahera Tengah	64,92
290	Padang Lawas	69,83	333	Banggai Kepulauan	63,98
291	Donggala	69,83	334	Seram Bagian Timur	63,94
292	Tanjung Jabung Timur	69,79	335	Sumba Barat	63,76
293	Mamasa	69,75	336	Alor	63,30
294	Probolinggo	69,72	337	Mahakam Ulu	63,17
295	Flores Timur	69,56	338	Selayar	62,97
296	Bungo	69,06	339	Nias	62,84
297	Kepahiang	68,99	340	Sumba Tengah	61,62

Peringkat	Nama Kabupaten	IKP	Peringkat	Nama Kabupaten	IKP
341	Belitung	61,15	379	Maluku Tenggara	48,80
342	Belitung Timur	60,94	380	Biak Namfor	48,51
343	Melawai	60,88	381	Teluk Bintuni	47,99
344	Timor Tengah Selatan	60,59	382	Kepulauan Mentawai	46,67
345	Muara Jambi	60,53	383	Kaimana	46,06
346	Pelalawan	60,51	384	Fak-Fak	45,51
347	Murung Raya	60,27	385	Sarmi	44,68
348	Keerom	60,24	386	Pulau Taliabu	44,45
349	Bangka Tengah	59,80	387	Maluku Tenggara Barat	43,52
350	Kotawaringin Barat	59,76	388	Yapen Waropen/ Yapen	43,38
351	Buru Selatan	58,88	389	Sorong Selatan	43,22
352	Karimun	58,29	390	Sabu Raijua	42,74
353	Gunung Mas	58,18	391	Kepulauan Aru	41,37
354	Jayapura	58,11	392	Tambrau	39,62
355	Mimika	57,45	393	Boven Digoel	38,58
356	Bintan	57,31	394	Kepulauan Meranti	37,58
357	Sumba Barat Daya	56,49	395	Waropen	37,50
358	Nias Barat	56,49	396	Teluk Wondama	33,07
359	Seram Bagian Barat	56,02	397	Supiori	31,59
360	Natuna	55,70	398	Maybrat	31,12
361	Siau Tagulandang Biaro	55,61	399	Puncak Jaya	30,03
362	Kampar	55,51	400	Jayawijaya	29,85
363	Kutai Barat	54,98	401	Yalimo	29,77
364	Labuhan Batu Selatan	54,78	402	Pegunungan Arfak	29,05
365	Kep.Sangihe Talaud	54,61	403	Mappi	28,59
366	Halmahera Barat	54,15	404	Pegunungan Bintang	24,46
367	Tana Tidung	53,76	405	Paniai	22,97
368	Raja Ampat	53,46	406	Lanny Jaya	22,87
369	Kepulauan Anambas	53,31	407	Tolikara	21,40
370	Rokan Hulu	53,24	408	Deiyai	21,36
371	Aceh Singkil	53,14	409	Yahukimo	21,21
372	Kep. Seribu	51,88	410	Intan Jaya	20,74
373	Lingga	50,47	411	Asmat	19,90
374	Halmahera Selatan	50,46	412	Membramo Raya	19,80
375	Musi Rawas Utara	49,70	413	Mamberamo Tengah	19,07
376	Bener Meriah	49,60	414	Nduga	15,54
377	Kepulauan Sula	49,23	415	Dogiyai	14,70
378	Banggai Laut	48,94	416	Puncak	12,63

Lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (93,32), Bukit Tinggi (89,01), Balikpapan (87,66), Banda Aceh (85,32) dan Madiun (85,23). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (24,53), Tual (34,80), Pagar Alam (41,62), Gunung Sitoli (49,53) dan Tanjung Balai (53,21). Peringkat dan IKP kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2020

Peringkat	Nama Kota	IKP	Peringkat	Nama Kota	IKP
1	Denpasar	93,32	36	Yogyakarta	80,68
2	Bukit Tinggi	89,01	37	Tangerang	80,37
3	Balikpapan	87,66	38	Tarakan	79,91
4	Banda Aceh	85,32	39	Palu	79,63
5	Madiun	85,23	40	Tomohon	79,44
6	Batam	85,09	41	Cimahi	79,14
7	Jakarta Barat	85,06	42	Tanjung Pinang	78,77
8	Kendari	84,91	43	Pematang Siantar	78,70
9	Surabaya	84,71	44	Pare Pare	78,56
10	Semarang	84,66	45	Binjai	78,16
11	Bontang	84,59	46	Banjarmasin	78,02
12	Ternate	84,43	47	Batu	77,06
13	Makasar	84,32	48	Surakarta	76,98
14	Malang	84,12	49	Jambi	76,90
15	Pangkal Pinang	83,84	50	Ambon	76,85
16	Jakarta Pusat	83,81	51	Metro	76,76
17	Jakarta Selatan	83,62	52	Tegal	76,74
18	Depok	83,23	53	mobago	75,90
19	Tangerang Selatan	83,14	54	Palangka Raya	75,34
20	Medan	83,12	55	Palopo	75,24
21	Bekasi	83,04	56	Kupang	73,71
22	Pekan Baru	82,85	57	Probolinggo	73,69
23	Mojokerto	82,77	58	Blitar	73,38
24	Salatiga	82,64	59	Pariaman	72,87
25	Padang Panjang	82,32	60	Palembang	72,57
26	Padang	82,12	61	Bogor	72,40
27	Payakumbuh	82,06	62	Mataram	71,86
28	Solok	82,02	63	Bandar Lampung	71,62
29	Jakarta Timur	81,99	64	Cirebon	71,28
30	Bandung	81,72	65	Kediri	71,16
31	Jakarta Utara	81,43	66	Bau-Bau	71,11
32	Manado	81,39	67	Langsa	70,89
33	Gorontalo	81,30	68	Sungai Penuh	70,38
34	Magelang	80,76	69	Cilegon	70,23
35	Samarinda	80,75	70	Banjar Baru	68,92

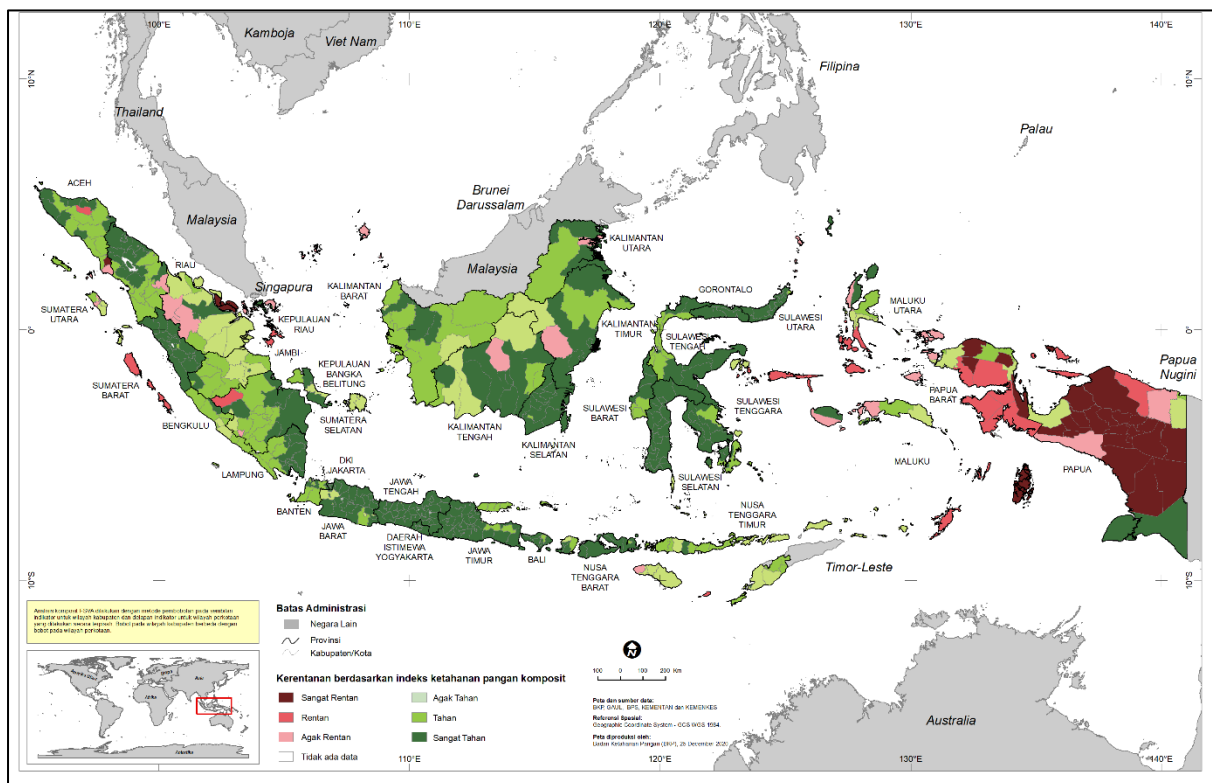
Peringkat	Nama Kota	IKP	Peringkat	Nama Kota	IKP
71	Jayapura	68,83	85	Pontianak	63,18
72	Pasuruan	68,71	86	Padang Sidempuan	61,64
73	Bitung	68,56	87	Prabumulih	61,23
74	Dumai	68,15	88	Serang	61,22
75	Tebing Tinggi	68,12	89	Tasikmalaya	58,82
76	Sibolga	67,84	90	Banjar	57,72
77	Sawah Lunto	67,36	91	Singkawang	55,30
78	Bengkulu	67,24	92	Tidore Kepulauan	54,66
79	Pekalongan	66,98	93	Lubuk Linggau	53,37
80	Sorong	66,03	94	Tanjung Balai	53,21
81	Bima	65,90	95	Gunung Sitoli	49,53
82	Sabang	65,87	96	Pagar Alam	41,62
83	Sukabumi	65,73	97	Tual	34,80
84	Lhokseumawe	63,26	98	Subulussalam	24,53

Lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (84,54), Jawa Tengah (82,31), Sulawesi Selatan (81,81), DI. Yogyakarta (80,67), dan Gorontalo (80,40). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (34,79), Papua Barat (49,40), Maluku (58,15), Kepulauan Riau (62,70) dan Maluku Utara (63,12). Peringkat dan IKP provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2020

Peringkat	Nama Provinsi	IKP	Peringkat	Nama Provinsi	IKP
1	Bali	84,54	18	Banten	73,48
2	Jawa Tengah	82,31	19	Kalimantan Tengah	72,58
3	Sulawesi Selatan	81,81	20	Kalimantan Utara	71,90
4	DI Yogyakarta	80,67	21	Sumatera Utara	71,84
5	Gorontalo	80,40	22	Kep. Bangka Belitung	71,21
6	Kalimantan Selatan	80,04	23	Kalimantan Barat	71,13
7	Jawa Timur	79,90	24	Aceh	70,92
8	Sumatera Barat	78,64	25	Bengkulu	70,28
9	Kalimantan Timur	78,24	26	Jambi	70,00
10	DKI Jakarta	77,97	27	Sumatera Selatan	68,67
11	Sulawesi Utara	77,79	28	Nusa Tenggara Timur	66,92
12	Lampung	77,43	29	Riau	64,12
13	Sulawesi Tenggara	77,06	30	Maluku Utara	63,12
14	Jawa Barat	76,78	31	Kepulauan Riau	62,70
15	Sulawesi Barat	76,36	32	Maluku	58,15
16	Nusa Tenggara Barat	75,60	33	Papua Barat	49,40
17	Sulawesi Tengah	75,10	34	Papua	34,79

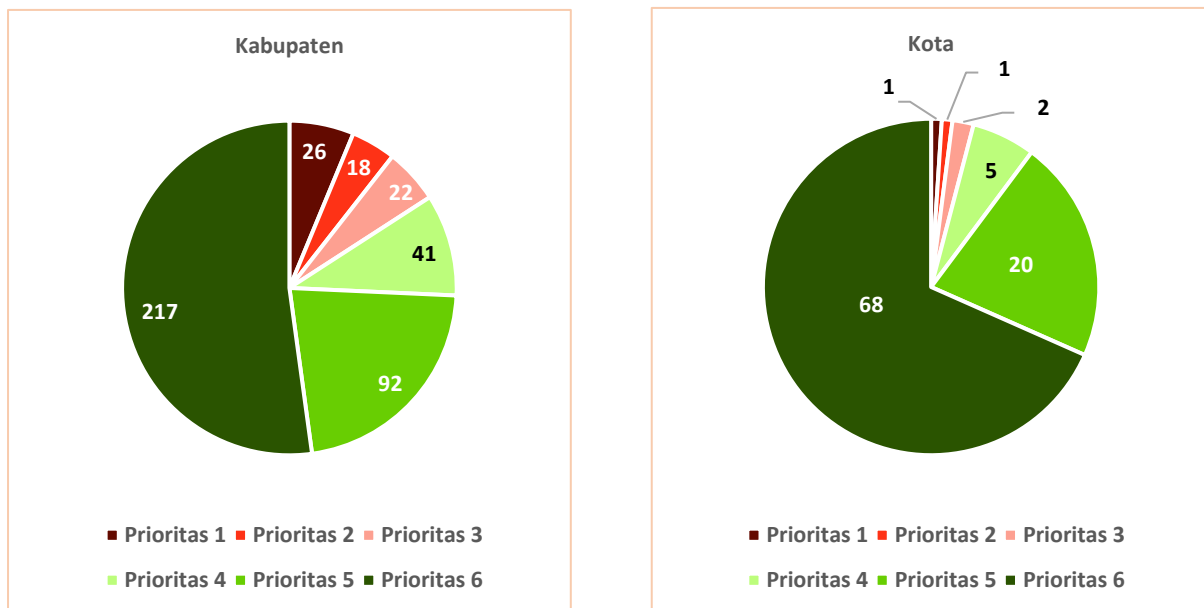
IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKP Kabupaten dan Kota berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2020

Sebanyak 66 kabupaten atau 15,8% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 26 kabupaten (6,2%) masuk kelompok 1, 18 kabupaten (4,3%) masuk kelompok 2 dan 22 kabupaten (5,3%) masuk kelompok 3. Dari 26 kabupaten kelompok 1, sebanyak 20 kabupaten berada di Provinsi Papua, 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat, 1 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Riau.

Sedangkan pada wilayah kota ada 4 kota (4%) dari 98 kota yang memiliki skor IKP rendah, yaitu terdapat 1 kota (1%) yang masuk kelompok 1 yaitu Kota Subulussalam di Provinsi Aceh, 1 kota (1%) masuk kelompok 2 yaitu Kota Tual di Provinsi Maluku, dan 2 kota (2%) yang masuk kelompok 3, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara, dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan (Gambar 3).



Gambar 3. Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2020

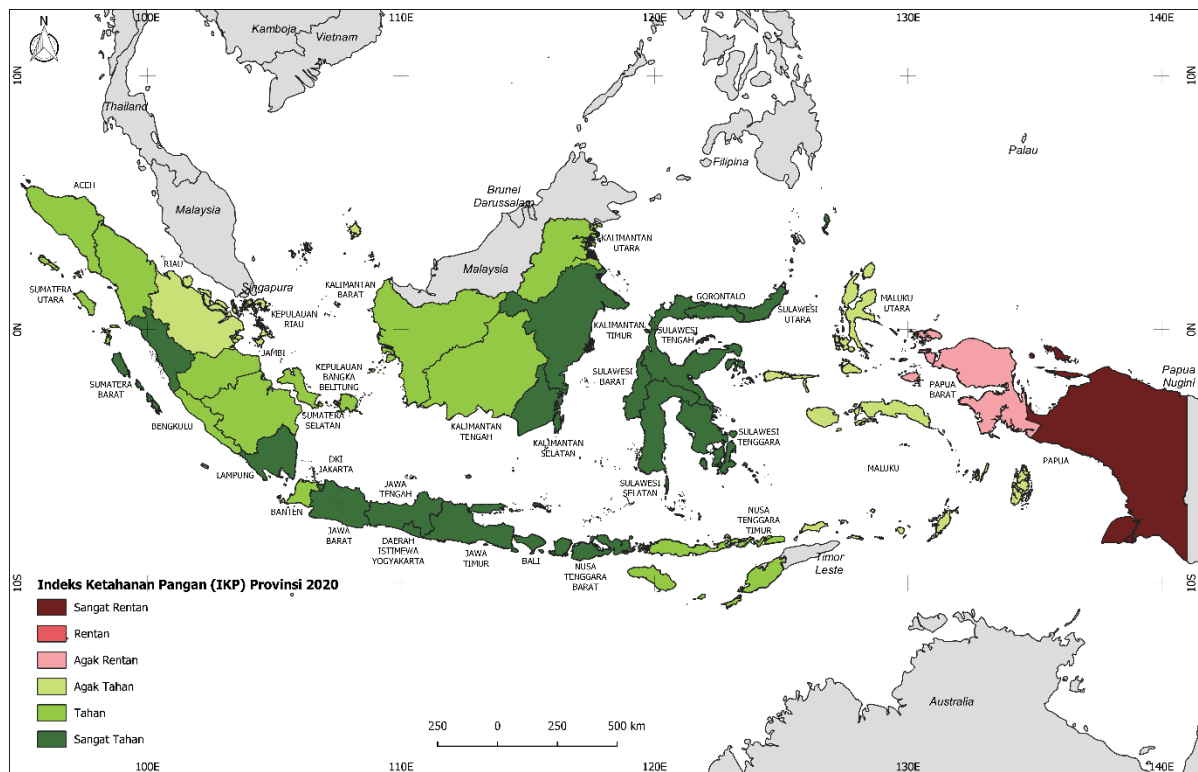
Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (66 kabupaten) diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya penduduk miskin, dan iii) tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan kelompok 1-3 adalah 4,61. Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Rata-rata persentase balita stunting pada daerah rentan pangan adalah 30,22 persen. Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka stunting di kabupaten tahan pangan yaitu 29,55%. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentase balita stunting 30-40 persen dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO 2000). Melihat kondisi tersebut, maka penanganan stunting harus menjadi fokus tidak hanya di kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten tahan pangan. Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan pangan sebesar 22,52 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,41 persen (Susenas Maret 2019).

Sementara kota-kota di kelompok 1-3 (4 kota) diindikasikan oleh: i) tingginya prevalensi balita stunting, ii) tingginya penduduk miskin, iii) rendahnya angka harapan hidup, dan iv) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Kota rentan pangan memiliki rata-rata pengeluaran pangan >65% masih tinggi yaitu sebesar 22,21 persen; rata-rata 35,25 persen penduduknya memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih dan rata-rata stunting pada balita sebesar 30,90 persen.

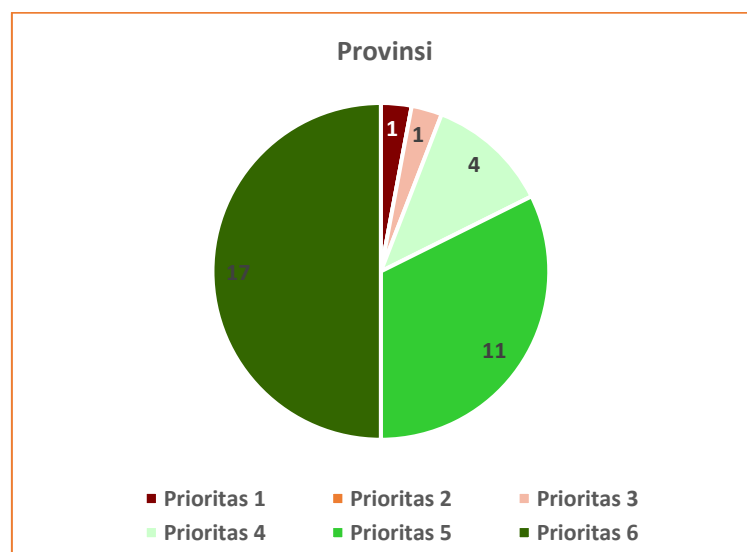
Wilayah provinsi juga dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP provinsi. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan provinsi

yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKP provinsi berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2020

Ada 2 provinsi atau 5,88% dari 34 provinsi memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 1 provinsi (2,94%) yaitu Papua masuk kedalam kelompok 1, dan 1 provinsi (2,94%) yaitu Papua Barat masuk kelompok 3 (Gambar 5). Provinsi-provinsi dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya penduduk miskin, dan iii) tingginya prevalensi balita stunting.



Gambar 5. Distribusi IKP Provinsi Tahun 2020

KESIMPULAN

1. IKP 2020 menunjukkan bahwa terdapat 66 kabupaten (15,8%) dari 416 kabupaten, 4 kota (4%) dari 98 kota dan 2 provinsi (5,88%) dari 34 provinsi masuk dalam kategori IKP rendah. Wilayah Indonesia bagian timur (Papua dan Papua Barat) secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif.
2. IKP bersifat dinamis dan dilakukan update setiap tahun untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah.
3. IKP dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan.

REFERENSI

- [DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- _____. 2013. *Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia*. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- [EIU] The Economist Intelligence Unit. 2016. *Global Food Security Index 2016 an Annual Measure of The State of Global Food Security*. Dupont (GB): London.
- _____. 2017. *Global Food Security Index 2017, Measuring Food Security and The Impact of Resources Risks*. Dupont (GB): London.
- [FAO] Food Agriculture Organization. 2015. The causes of food insecurity in rural areas. <http://www.fao.org/docrep/003/x8406e/X8406e02.htm>.
- [IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2014. *Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger*. Washington DC (US): IFPRI.
- Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. *Market Review*. 1(3): 54-57.
- Khan REA and Gill AR. 2009. Determinants of food security in rural areas of Pakistan. *MPRA Paper No. 17146*.
- Lubis R. 2010. Analisis wilayah rawan pangan dan gizi dalam perspektif perencanaan wilayah (studi kasus Bogor). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mahmood S., Sheikh KH, Mahmood T and Malik MH. 1991. Food poverty and its causes in Pakistan. *The Pakistan Development Review*. 30(4):821-834.
- Molnar J. 1999. Sound policies for food security: the role of culture and social organization. *Review of Agricultural Economics*. 1(2):489-98.
- Misselhorn AA. 2005. What drives food insecurity in Southern Africa? a meta-analysis of household economy studies. *Global Environmental Change*. 15:33–43.
- Nurdin Rahman, Muhammad Ryman Napirah, Devi Nadila and Bohari. 2017. Determinants of Stunting among Children in Urban Families in Palu, Indonesia. *Pakistan Journal of Nutrition*, 16: 750-756.
- [Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015*. Jakarta: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme.

- Sánchez MV dan Sbrana G. 2010. Determinants of education attainment and development goals in Yemen. UNDP/UN-DESA/World Bank project
- Schultz P. 1999. Health and schooling investments in Africa. *Journal of Economic Perspectives*, 13 (3): 67-88
- Sabarella. 2005. Model persamaan struktural kerawanan pangan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suhardjo. 1996. Pengertian dan kerangka pikir ketahanan pangan rumah tangga. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20 – 30 Mei 1996, Yogyakarta.
- Syngenta and Frontier Strategy Group. 2016. Rice Bowl Index 2016: Collective Responsibility. Singapore: Syngenta Asia Pacific Pte Ltd and Frontier Strategy Group.
- Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infrastructure, household characteristics and child height. *J Dev Econ*. 39(2):301-331.
- [Torlesse](#) H, [Cronin](#) AA, [Sebayang](#) SK, and [Nandy](#) R. 2016. Determinants of stunting in Indonesian children: evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. *BMC Public* 16:669
- [WHO] World Health Organization. 2000. Classification of severity of malnutrition in a community for children under 5 years of age from the management of nutrition in major emergencies. Geneva: WHO.
- Wiranthi PE, Suwarsinah HK and Adhi AK. 2002. Determinants of household food security: a comparative analysis of Eastern and Western Indonesia. *Indones J Agric Sci*. 15(1):17-28.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2020

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Aceh				
1	Simeulue	77,15	70,13	70,60	72,43
2	Aceh Singkil	20,85	67,18	66,82	53,14
3	Aceh Selatan	85,08	72,13	61,88	71,92
4	Aceh Tenggara	95,95	70,65	59,93	73,95
5	Aceh Timur	90,09	69,34	65,67	74,10
6	Aceh Tengah	70,20	76,88	67,37	71,07
7	Aceh Barat	86,98	74,73	75,25	78,61
8	Aceh Besar	93,27	75,58	83,34	83,99
9	Pidie	94,54	64,38	67,23	74,57
10	Bireuen	91,56	74,59	73,96	79,43
11	Aceh Utara	95,55	67,07	68,52	76,20
12	Aceh Barat Daya	93,84	71,64	67,40	76,60
13	Gayo Lues	90,71	69,00	66,91	74,68
14	Aceh Tamiang	86,26	74,79	76,68	78,99
15	Nagan Raya	85,41	71,29	69,97	75,00
16	Aceh Jaya	95,13	75,23	70,79	79,42
17	Bener Meriah	0,00	68,94	72,31	49,60
18	Pidie Jaya	95,24	66,26	73,02	77,66
	Sumatera Utara				
19	Nias	85,71	66,19	43,18	62,84
20	Mandailing Natal	84,83	74,08	51,74	68,37
21	Tapanuli Selatan	91,69	76,27	61,05	74,81
22	Tapanuli Tengah	74,67	74,66	63,33	70,13
23	Tapanuli Utara	94,45	74,57	67,85	77,84

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
24	Toba Samosir	96,84	78,32	70,64	80,80
25	Labuhan Batu	77,55	85,01	72,44	77,75
26	Asahan	62,24	82,91	73,91	73,11
27	Simalungun	92,63	80,89	70,71	80,34
28	Dairi	94,64	77,71	65,40	77,86
29	Karo	97,55	76,36	77,98	83,37
30	Deli Serdang	80,41	90,20	82,80	84,30
31	Langkat	80,34	80,21	75,58	78,40
32	Nias Selatan	87,39	66,69	48,48	65,62
33	Humbang Hasundutan	95,06	76,83	64,30	77,29
34	Pakpak Barat	85,18	79,50	55,63	71,65
35	Samosir	95,20	72,66	63,91	75,92
36	Serdang Bedagai	97,81	85,01	70,47	83,03
37	Batu Bara	82,02	78,98	70,67	76,57
38	Padang Lawas Utara	70,75	77,59	58,72	67,99
39	Padang Lawas	74,51	80,06	58,65	69,83
40	Labuhan Batu Selatan	0,00	85,70	72,67	54,78
41	Labuhan Batu Utara	73,98	79,45	67,66	73,09
42	Nias Utara	91,93	58,31	57,57	68,10
43	Nias Barat	72,36	54,49	46,09	56,49
	Sumatera Barat				
44	Kepulauan Mentawai	25,98	63,86	49,29	46,67
45	Pesisir Selatan	94,11	84,88	77,38	84,65
46	Solok	93,87	80,95	67,82	79,57
47	Sawah Lunto/Sijunjung	84,50	86,12	66,66	77,85
48	Tanah Datar	95,75	86,32	75,66	84,88
49	Padang Pariaman	92,60	84,14	69,93	80,99
50	Agam	93,62	85,76	75,73	84,10
51	Limapuluh Koto	93,48	82,89	68,77	80,42

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
52	Pasaman	95,98	81,49	66,23	79,73
53	Solok Selatan	95,34	84,68	67,50	81,00
54	Dharmasraya	75,96	89,89	70,95	78,13
55	Pasaman Barat	92,17	81,58	65,56	78,35
	Riau				
56	Kuantan Sengingi	44,90	84,16	72,84	67,85
57	Indragiri Hulu	30,20	90,47	75,94	66,58
58	Indragiri Hilir	72,46	83,67	51,62	67,48
59	Pelalawan	12,28	82,61	80,10	60,51
60	Siak	53,49	93,26	82,74	77,12
61	Kampar	0,00	86,54	73,87	55,51
62	Rokan Hulu	0,00	81,95	71,64	53,24
63	Bengkalis	34,98	89,46	71,54	65,95
64	Rokan Hilir	43,24	86,85	69,02	66,63
65	Kepulauan Meranti	0,08	64,98	45,15	37,58
	Jambi				
66	Kerinci	94,04	85,62	68,90	81,46
67	Merangin	70,85	83,45	66,25	72,79
68	Sarolangun	54,54	82,81	67,81	68,33
69	Batanghari	44,87	80,68	69,67	65,53
70	Muara Jambi	10,99	87,95	77,11	60,53
71	Tanjung Jabung Timur	83,33	78,86	52,84	69,79
72	Tanjung Jabung Barat	67,15	76,76	59,37	66,92
73	Tebo	51,39	86,04	67,74	68,33
74	Bungo	43,77	88,83	73,19	69,06
	Sumatera Selatan				
75	Ogan Komering Ulu	74,35	79,87	69,92	74,23
76	Ogan Komering Ilir	95,01	76,32	61,81	76,12
77	Muara Enim (Liot)	76,67	79,67	64,48	72,70

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
78	Lahat	81,42	74,99	59,07	70,55
79	Musi Rawas	89,75	79,62	66,80	77,53
80	Musi Banyuasin	86,32	76,97	65,12	75,03
81	Banyuasin	98,01	79,96	61,27	77,90
82	Ogan Komering Ulu Selatan	95,17	75,06	56,99	73,86
83	Ogan Komering Ulu Timur	97,59	86,12	65,26	81,22
84	Ogan Ilir	80,15	79,01	65,20	73,83
85	Empat Lawang	86,63	72,45	45,07	65,75
86	Penukal Abab Lematang Ilir	68,23	79,41	64,73	70,18
87	Musi Rawas Utara	22,00	68,56	56,33	49,70
	Bengkulu				
88	Bengkulu Selatan	95,18	68,97	63,24	74,54
89	Rejang Lebong	80,03	75,68	59,81	70,64
90	Bengkulu Utara	71,12	81,13	56,19	68,15
91	Kaur	86,72	70,84	58,54	70,68
92	Seluma	87,79	70,77	50,38	67,72
93	Mukomuko	77,71	82,75	58,29	71,46
94	Lebong	94,21	75,01	63,31	76,09
95	Kepahiang	80,49	76,87	54,47	68,99
96	Bengkulu Tengah	59,78	83,27	60,81	67,24
	Lampung				
97	Lampung Barat	83,92	80,00	62,12	74,02
98	Tanggamus	84,27	77,82	65,09	74,67
99	Lampung Selatan	95,33	76,30	69,34	79,23
100	Lampung Timur	98,57	78,37	66,04	79,50
101	Lampung Tengah	98,11	79,78	66,16	79,83
102	Lampung Utara	98,12	67,21	54,79	71,51
103	Way Kanan	94,20	77,46	54,62	73,34
104	Tulang Bawang	97,78	85,87	69,33	82,83

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
105	Pesawaran	95,37	76,96	71,12	80,15
106	Pringsewu	91,24	82,75	78,99	83,79
107	Mesuji	98,40	88,66	68,85	83,66
108	Tulang Bawang Barat	98,17	87,28	54,87	77,58
109	Pesisir Barat	93,07	72,22	58,35	72,93
	Kepulauan Bangka Belitung				
110	Bangka	65,64	91,21	80,61	79,30
111	Belitung	0,00	93,40	82,82	61,15
112	Bangka Barat	48,65	94,70	73,81	72,53
113	Bangka Tengah	0,00	92,01	80,49	59,80
114	Bangka Selatan	82,60	91,41	71,72	80,89
115	Belitung Timur	0,00	91,65	83,61	60,94
	Kepulauan Riau				
116	Karimun	0,00	90,34	77,97	58,29
117	Bintan	0,00	92,78	73,68	57,31
118	Natuna	0,00	91,24	70,82	55,70
119	Lingga	0,00	79,91	66,24	50,47
120	Kepulauan Anambas	0,00	90,20	65,61	53,31
	DKI Jakarta				
121	Kep. Seribu	0,00	67,81	78,85	51,88
	Jawa Barat				
122	Bogor	43,84	86,55	68,80	66,64
123	Sukabumi	86,58	80,99	67,27	77,18
124	Cianjur	89,40	78,63	64,46	76,19
125	Bandung	69,28	85,28	81,78	79,08
126	Garut	91,64	75,72	66,04	76,62
127	Tasikmalaya	88,27	74,54	61,08	73,28
128	Ciamis	87,87	82,70	70,11	79,21
129	Kuningan	88,96	76,47	75,94	80,01

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
130	Cirebon	85,09	79,43	75,81	79,68
131	Majalengka	94,30	77,40	73,78	81,02
132	Sumedang	92,82	79,64	74,31	81,46
133	Indramayu	96,57	74,42	77,18	82,17
134	Subang	95,01	82,27	73,69	82,66
135	Purwakarta	79,30	85,49	73,09	78,67
136	Karawang	93,38	84,44	77,92	84,51
137	Bekasi	75,48	89,88	85,62	83,86
138	Bandung Barat	72,60	79,16	75,57	75,76
139	Pangandaran	92,86	81,80	73,99	81,99
	Jawa Tengah				
140	Cilacap	92,95	83,06	78,09	84,04
141	Banyumas	80,03	82,69	79,17	80,48
142	Purbalingga	83,63	78,55	78,74	80,15
143	Banjarnegara	83,95	78,21	74,52	78,45
144	Kebumen	91,54	74,28	76,66	80,41
145	Purworejo	92,57	82,69	75,67	82,85
146	Wonosobo	84,96	74,91	76,55	78,58
147	Magelang	82,67	84,78	77,60	81,27
148	Boyolali	91,88	86,28	79,76	85,35
149	Klaten	90,27	81,21	81,47	84,03
150	Sukoharjo	92,14	87,96	86,81	88,76
151	Wonogiri	97,43	82,77	81,21	86,55
152	Karanganyar	90,72	84,67	86,50	87,22
153	Sragen	97,33	80,75	81,96	86,21
154	Grobogan	96,65	75,60	80,02	83,68
155	Blora	96,85	80,50	80,66	85,47
156	Rembang	92,03	77,03	82,57	83,75
157	Pati	96,75	85,82	83,70	88,25

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
158	Kudus	87,50	92,48	82,28	86,91
159	Jepara	86,71	85,22	80,81	83,90
160	Demak	95,26	78,39	82,36	85,04
161	Semarang	83,02	90,47	86,61	86,69
162	Temanggung	81,09	86,45	79,76	82,16
163	Kendal	89,68	84,58	82,41	85,24
164	Batang	86,86	82,79	75,96	81,28
165	Pekalongan	85,69	81,46	71,78	78,86
166	Pemalang	89,94	73,45	75,44	79,19
167	Tegal	86,06	84,10	75,89	81,41
168	Brebes	87,36	73,56	68,63	75,73
	DI Yogyakarta				
169	Kulon Progo	88,78	74,63	78,22	80,31
170	Bantul	73,23	83,60	81,69	79,73
171	Gunung Kidul	97,21	70,92	74,69	80,32
172	Sleman	66,16	90,38	88,35	82,30
	Jawa Timur				
173	Pacitan	92,29	76,28	74,14	80,23
174	Ponorogo	95,99	84,72	76,21	84,70
175	Trenggalek	90,67	81,79	71,63	80,39
176	Tulungagung	91,45	88,42	76,51	84,56
177	Blitar	91,39	86,55	76,07	83,81
178	Kediri	85,50	81,51	72,72	79,19
179	Malang	82,12	83,87	79,52	81,60
180	Lumajang	91,07	80,10	65,55	77,57
181	Jember	89,77	80,52	61,57	75,72
182	Banyuwangi	89,83	88,82	72,00	82,40
183	Bondowoso	92,54	72,26	60,59	73,68
184	Situbondo	92,87	77,31	67,09	77,89

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
185	Probolinggo	86,32	68,22	58,40	69,72
186	Pasuruan	86,17	83,35	68,52	78,26
187	Sidoarjo	65,34	92,58	90,11	83,42
188	Mojokerto	91,84	84,71	82,40	85,92
189	Jombang	91,00	83,13	77,97	83,43
190	Nganjuk	94,00	77,76	76,14	81,98
191	Madiun	95,80	81,66	79,40	85,00
192	Magetan	94,23	84,30	83,28	86,87
193	Ngawi	97,79	75,88	77,25	83,00
194	Bojonegoro	95,82	78,56	78,55	83,73
195	Tuban	96,16	76,51	79,41	83,57
196	Lamongan	96,87	79,34	81,90	85,62
197	Gresik	89,89	84,79	89,03	88,02
198	Bangkalan	91,03	66,76	67,18	74,21
199	Sampang	90,10	60,18	67,50	72,08
200	Pamekasan	83,93	71,84	69,36	74,48
201	Sumenep	93,80	64,29	67,31	74,35
	Banten				
202	Pandeglang	91,52	78,53	53,93	72,59
203	Lebak	88,26	76,76	53,19	70,78
204	Tangerang	49,79	87,84	77,94	72,47
205	Serang	85,29	85,97	64,22	77,07
	Bali				
206	Jembrana	84,23	87,06	77,94	82,56
207	Tabanan	91,13	93,74	86,49	90,05
208	Badung	73,52	99,59	93,38	89,29
209	Gianyar	82,46	97,49	89,94	89,96
210	Klungkung	84,95	91,04	81,39	85,35
211	Bangli	55,75	91,87	74,02	73,89

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
212	Karangasem	68,32	90,08	76,82	78,25
213	Buleleng	70,80	89,30	75,33	78,16
	Nusa Tenggara Barat				
214	Lombok Barat	85,43	77,06	67,93	75,92
215	Lombok Tengah	92,51	78,93	64,18	77,10
216	Lombok Timur	88,32	73,06	62,70	73,50
217	Sumbawa	98,61	79,83	71,96	82,31
218	Dompu	98,73	83,38	66,32	81,16
219	Bima	97,19	79,01	66,71	79,54
220	Sumbawa Barat	96,60	80,01	73,38	82,33
221	Lombok Utara	88,94	55,14	57,87	66,37
	Nusa Tenggara Timur				
222	Sumba Barat	91,02	44,50	57,76	63,76
223	Sumba Timur	91,96	52,92	58,03	66,68
224	Kupang	87,41	56,83	57,09	66,11
225	Timor Tengah Selatan	89,70	42,01	52,70	60,59
226	Timor Tengah Utara	89,73	52,99	64,49	68,61
227	Belu	87,58	68,89	60,29	71,06
228	Alor	79,92	56,75	55,74	63,30
229	Lembata	80,94	56,15	62,63	66,18
230	Flores Timur	71,96	73,23	65,00	69,56
231	Sikka	84,36	70,16	66,12	72,81
232	Ende	74,52	60,49	70,49	68,70
233	Ngada	93,86	74,05	74,67	80,24
234	Manggarai	88,76	61,11	66,84	71,70
235	Rote Nda	87,38	52,64	65,52	68,21
236	Manggarai Barat	94,06	62,60	60,14	71,05
237	Sumba Tengah	94,06	39,49	53,88	61,62
238	Sumba Barat Daya	88,81	38,62	45,66	56,49

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
239	Nageko	90,39	71,79	64,98	74,64
240	Manggarai Timur	91,08	43,39	63,10	65,58
241	Sabu Raijua	41,31	39,15	46,51	42,74
242	Malaka	91,64	64,92	54,80	68,89
	Kalimantan Barat				
243	Sambas	90,11	85,28	43,56	70,04
244	Bengkayang	94,16	83,73	69,51	81,17
245	Landak	92,59	73,82	56,45	72,50
246	Pontianak/ Mempawah	87,74	85,12	55,55	74,08
247	Sanggau	88,17	88,63	62,90	78,20
248	Ketapang	85,82	81,21	60,32	74,24
249	Sintang	72,26	83,96	65,07	72,89
250	Kapuas Hulu	72,85	80,74	61,55	70,70
251	Sekadau	89,39	82,75	61,43	76,22
252	Melawai	52,25	73,04	58,23	60,88
253	Kayong Utara	91,39	81,90	55,34	74,12
254	Kubu Raya	84,13	90,26	50,11	72,36
	Kalimantan Tengah				
255	Kotawaringin Barat	0,00	94,55	78,48	59,76
256	Kotawaringin Timur	77,91	90,55	68,16	77,80
257	Kapuas	94,85	86,44	58,61	77,83
258	Barito Selatan	53,08	88,06	63,60	67,78
259	Barito Utara	87,93	90,63	73,82	83,10
260	Sukamara	51,92	94,26	74,18	73,52
261	Lamandau	87,37	92,07	73,18	83,10
262	Seruyan	32,30	88,89	72,91	65,52
263	Katingan	87,48	88,08	65,68	78,94
264	Pulang Pisau	94,26	89,82	62,03	80,03
265	Gunung Mas	14,41	87,72	68,85	58,18

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
266	Barito Timur	76,35	88,84	63,51	74,96
267	Murung Raya	40,36	84,14	57,31	60,27
	Kalimantan Selatan				
268	Tanah Laut	95,13	92,54	63,87	81,85
269	Kota Baru	86,40	88,24	68,93	79,96
270	Banjar	92,41	92,12	61,84	80,09
271	Barito Kuala	97,31	88,53	60,82	80,08
272	Tapin	97,03	89,75	69,87	83,98
273	Hulu Sungai Selatan	94,40	86,43	61,09	78,68
274	Hulu Sungai Tengah	94,41	84,64	64,47	79,50
275	Hulu Sungai Utara	92,14	90,15	64,28	80,40
276	Tabalong	86,60	86,81	71,05	80,44
277	Tanah Bumbu	89,01	93,28	79,54	86,50
278	Balangan	94,84	86,61	69,07	82,06
	Kalimantan Timur				
279	Pasir	81,01	87,25	79,46	82,26
280	Kutai Barat	0,00	84,59	74,01	54,98
281	Kutai	81,76	91,64	80,65	84,28
282	Kutai Timur	49,27	87,78	80,05	73,13
283	Berau	82,39	93,71	81,26	85,34
284	Penajam Paser Utara	88,10	90,23	81,75	86,20
285	Mahakam Ulu	41,96	79,92	66,52	63,17
	Kalimantan Utara				
286	Malinau	57,15	90,86	65,94	70,78
287	Bulungan	69,09	88,76	75,68	77,63
288	Tana Tidung	0,00	93,29	64,43	53,76
289	Nunukan	72,07	87,77	73,74	77,45

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Sulawesi Utara				
290	Bolaang Mongondow	98,72	87,83	73,39	85,32
291	Minahasa	90,31	87,07	83,57	86,64
292	Kep.Sangihe Talaud	0,00	77,46	78,42	54,61
293	Kepulauan Talaud	85,17	82,51	77,18	81,17
294	Minahasa Selatan	91,77	81,45	80,50	84,17
295	Minahasa Utara	90,07	85,35	83,59	86,06
296	Bolaang Mongondow Utara	96,17	79,70	70,88	81,11
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	0,00	84,98	75,28	55,61
298	Minahasa Tenggara	93,99	78,57	77,24	82,66
299	Bolaang Mongondow Selatan	93,81	79,29	69,88	79,88
300	Bolaang Mongondow Timur	96,12	89,93	71,24	84,31
	Sulawesi Tengah				
301	Banggai Kepulauan	50,95	69,59	69,54	63,98
302	Banggai	94,96	88,62	75,77	85,38
303	Morowali	91,96	81,51	76,00	82,44
304	Poso	94,59	79,62	79,90	84,22
305	Donggala	86,22	68,13	58,81	69,83
306	Toli-Toli	90,74	79,15	69,24	78,66
307	Buol	88,66	72,64	72,93	77,56
308	Parigi Moutong	94,73	72,22	62,41	75,05
309	Tojo Una-Una	89,42	69,37	74,71	77,52
310	Sigi	91,47	76,30	61,04	74,75
311	Banggai Laut	1,04	72,32	67,33	48,94
312	Morowali Utara	88,95	75,44	72,48	78,31
	Sulawesi Selatan				
313	Selayar	25,85	80,59	77,60	62,97
314	Bulukumba	95,66	88,21	71,12	83,61
315	Bantaeng	95,78	85,02	82,84	87,38

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
316	Jeneponto	97,12	78,54	72,13	81,55
317	Takalar	93,86	87,23	71,32	82,85
318	Gowa	94,60	89,03	74,91	85,05
319	Sinjai	94,22	88,54	71,82	83,56
320	Maros	95,87	85,85	71,47	83,11
321	Pangkajene Kepulauan	91,20	78,59	70,57	79,16
322	Barru	96,56	89,41	77,05	86,61
323	Bone	98,37	86,38	68,40	82,79
324	Soppeng	98,81	88,79	74,70	86,16
325	Wajo	99,07	87,99	68,51	83,52
326	Sidenreng Rappang	99,27	91,01	75,20	87,17
327	Pinrang	99,07	84,26	70,04	83,01
328	Enrekang	95,09	80,05	68,78	80,06
329	Luwu	97,45	81,25	73,97	83,20
330	Tana Toraja	87,60	78,52	67,60	76,88
331	Luwu Utara	97,25	80,97	67,50	80,47
332	Luwu Timur	96,37	91,63	75,75	86,70
333	Toraja Utara	92,39	79,15	70,33	79,59
	Sulawesi Tenggara				
334	Buton	74,93	80,97	66,65	73,43
335	Muna	77,41	82,58	73,57	77,43
336	Konawe/Kab Kendari	96,14	84,76	72,28	83,18
337	Kolaka	86,28	84,18	75,53	81,35
338	Konawe Selatan	91,81	86,36	70,91	81,82
339	Bombana	91,86	84,32	75,44	83,03
340	Wakatobi	73,27	81,09	71,57	74,93
341	Kolaka Utara	87,82	79,56	74,30	79,93
342	Buton Utara	59,54	80,77	71,42	70,66
343	Konawe Utara	82,90	78,94	63,60	73,99

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
344	Kolaka Timur	96,91	81,88	78,16	84,90
345	Konawe Kepulauan	55,28	79,12	67,82	67,45
346	Muna Barat	86,05	81,76	69,85	78,28
347	Buton Tengah	62,54	81,38	75,79	73,49
348	Buton Selatan	77,13	80,82	57,01	70,19
	Gorontalo				
349	Boalemo	100,00	73,44	69,88	79,99
350	Gorontalo	96,03	78,12	70,05	80,26
351	Pohuwato	99,02	76,51	71,71	81,34
352	Bone Bolango	87,23	80,67	74,38	80,12
353	Gorontalo Utara	98,02	75,78	68,17	79,41
	Sulawesi Barat				
354	Majene	84,67	73,55	65,60	73,71
355	Polewali Mamasa	94,21	71,70	58,75	73,27
356	Mamasa	94,23	70,85	50,57	69,75
357	Mamuju	93,71	83,22	63,71	78,56
358	Mamuju Utara	85,05	90,56	68,03	79,89
359	Mamuju Tengah	97,11	89,43	67,46	82,95
	Maluku				
360	Maluku Tenggara Barat	0,00	57,06	66,00	43,52
361	Maluku Tenggara	0,00	70,79	68,92	48,80
362	Maluku Tengah	77,75	68,91	70,00	72,00
363	Buru	90,71	72,90	69,60	76,92
364	Kepulauan Aru	0,00	58,85	59,27	41,37
365	Seram Bagian Barat	49,93	64,76	54,03	56,02
366	Seram Bagian Timur	77,43	61,16	55,89	63,94
367	Maluku Barat Daya	83,31	58,52	60,01	66,55
368	Buru Selatan	40,55	69,70	64,52	58,88

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Maluku Utara				
369	Halmahera Barat	7,93	87,77	63,59	54,15
370	Halmahera Tengah	48,73	78,19	67,11	64,92
371	Kepulauan Sula	0,00	81,52	61,94	49,23
372	Halmahera Selatan	0,00	88,08	60,08	50,46
373	Halmahera Utara	78,60	91,01	68,90	78,44
374	Halmahera Timur	91,57	76,59	59,82	74,38
375	Pulau Morotai	85,28	85,36	62,20	76,07
376	Pulau Taliabu	0,00	80,47	50,77	44,45
	Papua Barat				
377	Fak-Fak	0,00	65,45	64,68	45,51
378	Kaimana	0,00	74,81	59,05	46,06
379	Teluk Wondama	0,00	48,81	46,06	33,07
380	Teluk Bintuni	32,10	56,43	53,56	47,99
381	Manokwari	65,90	75,55	82,45	75,42
382	Sorong Selatan	0,00	67,29	57,58	43,22
383	Sorong	70,84	64,31	63,32	65,87
384	Raja Ampat	24,24	71,94	61,51	53,46
385	Tambrau	58,12	41,12	24,61	39,62
386	Maybrat	0,00	51,55	39,14	31,12
387	Manokwari Selatan	87,53	62,86	51,67	65,78
388	Pegunungan Arfak	0,00	42,84	40,50	29,05
	Papua				
389	Merauke	97,39	82,54	59,06	77,60
390	Jayawijaya	0,00	47,29	39,17	29,85
391	Jayapura	24,90	81,54	65,44	58,11
392	Nabire	63,32	65,62	72,42	67,65
393	Yapen Waropen/ Kep. Yapen	0,00	57,15	65,59	43,38
394	Biak Namfor	0,00	67,80	70,43	48,51

No.	Kabupaten	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
395	Paniai	0,00	39,91	27,49	22,97
396	Puncak Jaya	0,00	51,66	36,33	30,03
397	Mimika	0,00	79,75	83,81	57,45
398	Boven Digoel	0,00	67,98	45,46	38,58
399	Mappi	0,00	43,61	38,77	28,59
400	Asmat	0,00	46,80	14,66	19,90
401	Yahukimo	0,00	19,94	38,08	21,21
402	Pegunungan Bintang	0,00	38,31	32,42	24,46
403	Tolikara	0,00	35,97	26,52	21,40
404	Sarmi	0,00	70,54	58,79	44,68
405	Keerom	37,72	75,67	65,55	60,24
406	Waropen	0,00	52,49	54,39	37,50
407	Supiori	0,00	41,97	47,48	31,59
408	Membramo Raya	0,00	39,45	19,92	19,80
409	Nduga	0,00	32,75	14,30	15,54
410	Lanny Jaya	0,00	29,62	34,97	22,87
411	Mamberamo Tengah	0,00	31,01	24,42	19,07
412	Yalimo	0,00	43,43	41,84	29,77
413	Puncak	0,00	6,46	26,72	12,63
414	Dogiyai	0,00	29,18	14,87	14,70
415	Intan Jaya	0,00	38,86	22,70	20,74
416	Deiyai	0,00	41,08	22,60	21,36

Keterangan:

- Jumlah Kabupaten adalah 416
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Kabupaten dihitung dengan memperhitungkan IK, IA dan IP
- Bobot IK = 0,30; IA = 0,30; dan IP= 0,40

Lampiran 2. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun 2020

No.	Kota	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Aceh				
1	Kota Banda Aceh	0,00	86,28	84,53	85,32
2	Kota Sabang	27,78	56,89	73,22	65,87
3	Kota Langsa	90,53	74,47	67,97	70,89
4	Kota Lhokseumawe	94,60	67,80	59,55	63,26
5	Kota Subulussalam	96,69	48,71	4,75	24,53
	Sumatera Utara				
6	Kota Sibolga	0,00	59,27	74,85	67,84
7	Kota Tanjung Balai	11,90	46,06	59,05	53,21
8	Kota Pematang Siantar	94,76	72,46	83,80	78,70
9	Kota Tebing Tinggi	92,09	72,20	64,78	68,12
10	Kota Medan	0,00	77,22	87,95	83,12
11	Kota Binjai	92,15	79,51	77,05	78,16
12	Kota Padang Sidempuan	97,41	72,68	52,60	61,64
13	Kota Gunung Sitoli	96,79	46,78	51,78	49,53
	Sumatera Barat				
14	Kota Padang	95,30	88,47	76,92	82,12
15	Kota Solok	99,08	84,40	80,06	82,02
16	Kota Sawah Lunto	98,53	79,19	57,69	67,36
17	Kota Padang Panjang	96,47	87,85	77,79	82,32
18	Kota Bukit Tinggi	92,55	91,27	87,17	89,01
19	Kota Payakumbuh	98,72	81,51	82,51	82,06
20	Kota Pariaman	98,79	79,26	67,64	72,87
	Riau				
21	Kota Pekanbaru	79,63	83,66	82,18	82,85
22	Kota Dumai	67,29	81,07	57,58	68,15

No.	Kota	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Jambi				
23	Kota Jambi	55,56	75,49	78,06	76,90
24	Kota Sungai Penuh	100,00	82,22	60,69	70,38
	Sumatera Selatan				
25	Kota Palembang	54,99	71,25	73,64	72,57
26	Kota Prabumulih	72,46	70,74	53,45	61,23
27	Kota Pagar Alam	97,40	67,84	20,16	41,62
28	Kota Lubuk Linggau	92,48	67,46	41,84	53,37
	Bengkulu				
29	Kota Bengkulu	80,24	60,06	73,12	67,24
	Lampung				
30	Kota Bandar Lampung	0,00	76,29	67,79	71,62
31	Kota Metro	96,97	81,08	73,23	76,76
	Kep. Bangka Belitung				
32	Kota Pangkal Pinang	0,00	91,40	77,65	83,84
	Kepulauan Riau				
33	Kota Batam	0,00	90,29	80,85	85,09
34	Kota Tanjung Pinang	0,00	82,38	75,81	78,77
	DKI Jakarta				
35	Kota Jakarta Selatan	0,00	93,89	75,21	83,62
36	Kota Jakarta Timur	0,00	89,09	76,18	81,99
37	Kota Jakarta Pusat	0,00	85,07	82,78	83,81
38	Kota Jakarta Barat	0,00	88,72	82,07	85,06
39	Kota Jakarta Utara	0,00	80,08	82,54	81,43
	Jawa Barat				
40	Kota Bogor	31,99	78,72	67,23	72,40
41	Kota Sukabumi	93,01	70,35	61,95	65,73
42	Kota Bandung	0,00	86,36	77,92	81,72
43	Kota Cirebon	0,00	74,14	68,93	71,28

No.	Kota	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
44	Kota Bekasi	0,00	90,38	77,04	83,04
45	Kota Depok	0,00	95,29	73,36	83,23
46	Kota Cimahi	0,00	83,17	75,84	79,14
47	Kota Tasikmalaya	94,78	61,14	56,92	58,82
48	Kota Banjar	98,82	65,75	51,14	57,72
	Jawa Tengah				
49	Kota Magelang	55,44	80,66	80,85	80,76
50	Kota Surakarta	0,00	78,70	75,58	76,98
51	Kota Salatiga	86,11	87,99	78,27	82,64
52	Kota Semarang	73,25	90,17	80,14	84,66
53	Kota Pekalongan	88,02	78,05	57,92	66,98
54	Kota Tegal	74,77	75,97	77,37	76,74
	DI Yogyakarta				
55	Kota Yogyakarta	0,00	85,07	77,08	80,68
	Jawa Timur				
56	Kota Kediri	89,92	79,80	64,09	71,16
57	Kota Blitar	95,98	81,15	67,03	73,38
58	Kota Malang	79,24	91,14	78,38	84,12
59	Kota Probolinggo	96,38	86,15	63,51	73,69
60	Kota Pasuruan	93,96	71,56	66,37	68,71
61	Kota Mojokerto	87,31	86,87	79,42	82,77
62	Kota Madiun	92,89	90,12	81,23	85,23
63	Kota Surabaya	0,00	87,66	82,29	84,71
64	Kota Batu	87,24	90,20	66,32	77,06
	Banten				
65	Kota Tangerang	0,00	86,58	75,29	80,37
66	Kota Cilegon	85,86	84,36	58,68	70,23
67	Kota Serang	97,09	70,25	53,83	61,22
68	Kota Tangerang Selatan	0,00	97,23	71,62	83,14

No.	Kota	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Bali				
69	Kota Denpasar	81,69	98,49	89,09	93,32
	Nusa Tenggara Barat				
70	Kota Mataram	89,69	76,08	68,40	71,86
71	Kota Bima	99,26	78,50	55,60	65,90
	Nusa Tenggara Timur				
72	Kota Kupang	41,04	79,18	69,24	73,71
	Kalimantan Barat				
73	Kota Pontianak	0,00	82,69	47,21	63,18
74	Kota Singkawang	95,36	78,63	36,21	55,30
	Kalimantan Tengah				
75	Kota Palangka Raya	0,00	87,25	65,60	75,34
	Kalimantan Selatan				
76	Kota Banjarmasin	87,42	85,11	72,22	78,02
77	Kota Banjar Baru	86,15	89,08	52,42	68,92
	Kalimantan Timur				
78	Kota Balikpapan	42,45	97,44	79,66	87,66
79	Kota Samarinda	66,12	88,62	74,31	80,75
80	Kota Bontang	0,00	91,29	79,11	84,59
	Kalimantan Utara				
81	Kota Tarakan	61,86	87,90	73,38	79,91
	Sulawesi Utara				
82	Kota Manado	76,59	81,40	81,38	81,39
83	Kota Bitung	93,83	74,98	63,31	68,56
84	Kota Tomohon	99,05	87,16	73,12	79,44
85	Kota Kotamobago	99,15	86,40	67,30	75,90
	Sulawesi Tengah				
86	Kota Palu	26,06	86,58	73,95	79,63

No.	Kota	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Sulawesi Selatan				
87	Kota Makasar	53,89	90,13	79,57	84,32
88	Kota Pare Pare	94,11	86,19	72,32	78,56
89	Kota Palopo	97,91	82,81	69,04	75,24
	Sulawesi Tenggara				
90	Kota Kendari	78,46	91,01	79,92	84,91
91	Kota Bau-Bau	95,30	83,32	61,12	71,11
	Gorontalo				
92	Kota Gorontalo	92,97	92,02	72,52	81,30
	Maluku				
93	Kota Ambon	0,00	89,07	66,86	76,85
94	Kota Tual	60,47	25,41	42,48	34,80
	Maluku Utara				
95	Kota Ternate	34,58	94,76	75,98	84,43
96	Kota Tidore Kepulauan	98,66	81,34	32,83	54,66
	Papua Barat				
97	Kota Sorong	0,00	66,66	65,51	66,03
	Papua				
98	Kota Jayapura	86,55	76,94	62,20	68,83

Keterangan:

- Jumlah Kota adalah 98
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Kota dihitung dengan memperhitungkan IA dan IP. Sedangkan IK tidak dimasukkan dalam perhitungan IKP
- Bobot IA = 0,45 dan IP= 0,55

Lampiran 3. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi Tahun 2020

No.	Provinsi	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
1	Aceh	80,43	70,17	67,29	70,92
2	Sumatera Utara	81,59	73,90	65,55	71,84
3	Sumatera Barat	86,11	83,39	71,12	78,64
4	Riau	29,16	84,06	69,52	64,12
5	Jambi	57,88	82,61	67,42	70,00
6	Sumatera Selatan	80,87	75,61	58,30	68,67
7	Bengkulu	81,45	74,54	59,82	70,28
8	Lampung	94,35	79,20	65,38	77,43
9	Kep. Bangka Belitung	32,82	92,25	78,67	71,21
10	Kepulauan Riau	0,00	88,16	73,00	62,70
11	Dki Jakarta	0,00	84,11	79,60	77,97
12	Jawa Barat	84,62	80,00	71,36	76,78
13	Jawa Tengah	89,43	81,89	78,68	82,31
14	Di Yogyakarta	81,34	80,92	80,01	80,67
15	Jawa Timur	90,54	80,54	73,58	79,90
16	Banten	78,72	83,44	63,59	73,48
17	Bali	76,39	93,18	82,71	84,54
18	Nusa Tenggara Barat	93,29	76,10	65,50	75,60
19	Nusa Tenggara Timur	85,26	57,36	60,71	66,92
20	Kalimantan Barat	83,41	82,27	55,96	71,13
21	Kalimantan Tengah	61,40	89,38	67,57	72,58
22	Kalimantan Selatan	92,70	88,72	66,11	80,04
23	Kalimantan Timur	60,64	89,25	77,68	78,24
24	Kalimantan Utara	49,58	89,71	70,63	71,90
25	Sulawesi Utara	76,01	82,94	75,08	77,79
26	Sulawesi Tengah	80,31	76,27	70,32	75,10
27	Sulawesi Selatan	92,45	85,01	72,61	81,81

No.	Provinsi	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
28	Sulawesi Tenggara	79,99	82,52	70,88	77,06
29	Gorontalo	96,06	79,42	71,12	80,40
30	Sulawesi Barat	91,50	79,89	62,35	76,36
31	Maluku	46,63	63,38	61,60	58,15
32	Maluku Utara	39,01	84,51	60,32	63,12
33	Papua Barat	28,23	60,74	54,59	49,40
34	Papua	7,98	49,49	42,29	34,79

Keterangan:

- Jumlah Provinsi adalah 34
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan IK, IA dan IP.
- Bobot IK = 0,30; IA = 0,30; dan IP= 0,40



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Harsono RM No 3 Ragunan
Jakarta 12550 INDONESIA
Telp. (021) 7805035, 7805641
Fax. (021) 78846536